

PARADIGMA PENDIDIKAN MASA DEPAN

Hasnah

PGSD UPP Parepare Fakultas Ilmu Pendidikan UNM

Email: hasnahunm@yahoo.co.id

Abstrak

Paradigma baru pembelajaran kita pahami bersama, banyak pandangan yang memberikan arah baru terhadap proses dan dimensi-dimensi pendidikan yang semakin mendorong terjadinya perubahan konsep dan cara pandang terhadap eksistensi pembelajaran sehingga dapat dijadikan sebagai kerangka berpikir didalam memahami lebih dalam persoalan persoalan pembelajaran. Dengan mengkaji paradigma alternatif pembelajaran ini para pendidik atau calon pendidik diharapkan dapat memandang suatu masalah, mengambil tindakan/keputusan yang terkait dengan pembelajaran secara arif sehingga upaya pengembangan potensi peserta didik sebagai muara dari seluruh kegiatan pembelajaran. Sehubungan dengan itu maka lembaga pendidikan harus bergeser untuk mengembangkan kultur pembelajaran yang holistik termasuk mengembangkan visi pendidikan yang jelas, konsisten, disertai dengan kepemimpinan yang dapat memberikan arah, memajukan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran, mengembangkan masyarakat pembelajaran, mendorong munculnya iklim belajar yang demokratis dimanapun juga, dan secara sadar mengembangkan proses sosialisasi profesional, baik dikalangan guru maupun siswa.

Kata Kunci: Paradigma, Baru, Pendidikan masa depan, dan holistik.

Abstract

The new paradigm of learning we understand, a lot of views that provide a new direction to the process and the dimensions of education are increasingly encouraging change concepts and the perception of the existence of learning that can be used as a frame of mind in understanding the deeper issues of learning problems. By reviewing this learning paradigm alternative educators or prospective educators are expected to look at a problem, take action / decision related to learning wisely so that efforts potential developments of learners as the estuary of all learning activities. In connection with that the educational institutions should shift to developing a culture of learning, including developing a holistic vision of education that is clear, consistent, accompanied by a leadership that can provide direction, promote student involvement in the learning process, develop learning communities, encouraging the emergence of a democratic learning climate where jugaf and consciously develop the professional socialization process, both among teachers and students.

Keywords: Paradigm, New, future education, and holistic.

PENDAHULUAN

Pendidikan dalam arti luas adalah proses yang berkaitan dengan upaya untuk mengembangkan tiga aspek pada diri seseorang dalam kehidupannya, yakni pandangan hidup, sikap hidup, dan keterampilan hidup. Upaya untuk mengembangkan ketiga aspek tersebut

dapat dilaksanakan di sekolah, luar sekolah, dan keluarga. Bertolak dari konsep tersebut di atas, maka sesungguhnya pendidikan merupakan pembudayaan atau *enculturation*, yaitu suatu proses untuk mentasbihkan seseorang mampu hidup dalam suatu budaya tertentu.

Dalam arti sempit pendidikan adalah pengajaran yang diselenggarakan umumnya di

sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Sedangkan ahli memandang pendidikan adalah pengaruh orang dewasa terhadap anak yang belum dewasa agar mempunyai kemampuan yang sempurna dan kecerdasan penuh terhadap hubungan-hubungan dan tugas-tugas sosialnya dalam bermasyarakat

Menurut Mudyaharjo (2001:6) mengatakan bahwa pendidikan segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup serta pendidikan dapat di artikan sebagai pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal.

Dalam pengertian yang agak luas menurut Muhibinsyah (2003:10) pendidikan sebagai sebuah proses dengan metode-metode tertentu sehingga orang memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan.

Selanjutnya menurut Poerbakawartja dan Harahap (1981) pendidikan meliputi semua perbuatan dan usaha dari generasi tua untuk mengalihkan pengetahunnya, pengalamannya, kecakapannya dan keterampilannya kepada generasi muda sebagai usaha menyiapkannya agar dapat memenuhi fungsi hidupnya baik jasmani maupun rohaniah. Artinya pendidikan adalah usaha secara sengaja dari orang dewasa untuk dengan pengaruhnya meningkatkan si Anak kekedewasaan yang selalu diartikan mampu menimbulkan tanggung jawab moril dari segala perbuatannya

Jadi pendidikan dapat dimaknai sebagai proses mengubah tingkah laku anak didik agar menjadi manusia dewasa yang mampu hidup mandiri dan sebagai anggota masyarakat dalam lingkungan alam sekitar dimana individu itu berada. Pendidikan tidak hanya mencakup pengembangan intelektualitas saja, akan tetapi lebih ditekankan pada proses pembinaan kepribadian anak didik secara menyeluruh sehingga anak menjadi lebih dewasa. dari uraian dan pengertian pendidikan di atas disimpulkan bahwa pada dasarnya pendidikan adalah usaha manusia (pendidik) untuk dengan penuh tanggung jawab membimbing anak-anak didik menjadi kedewasaan.

Dilihat dari sudut proses bahwa pendidikan adalah proses dalam rangka mempengaruhi peserta didik supaya mampu menyesuaikan diri sebaik mungkin dengan lingkungannya dan yang akan menimbulkan perubahan pada dirinya yang memungkinkan sehingga berfungsi sesuai kompetesinya dalam kehidupan masyarakat. Dilihat dari sudut pengertian atau defenisi, dengan demikian pendidikan itu ialah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan yang berlangsung di sekolah dan diluar sekolah. Usha sadar tersebut dilakukan dalam bentuk pengajaran dimana ada pendidik yang melayani para siswanya melakukan kegiatan belajar, dan pendidik menilai atau mengukur tingkat keberhasilan belajar siswa tersebut dengan prosedur yang ditentukan.

Pendidikan zaman Indonesia merdeka sampai tahun 1965 banyak dipengaruhi oleh sistem pendidikan Belanda, sebaliknya setelah tahun 1966 dipengaruhi oleh sistem Amerika. Sistem pendidikan Amerika menekankan bahwa praktek pendidikan merupakan instrument dalam proses pembangunan. Hasilnya berkembanglah manusia-manusia yang dengan mentalitas juklak dan juknis yang siap diperlakukan secara seragam.

Hal itu melahirkan satu produk dari proses pendidikan yang menyimpang yaitu munculnya mentalitas jalan pintas dengan semangat untuk mendapatkan hasil secepat mungkin dan tidak menghiraukan bahwa segala sesuatu harus melewati proses yang memerlukan waktu. Aspek negatif lain dari jalan pintas ini adalah dominannya nilai ekstrinsik dikalangan masyarakat termasuk generasi muda, muncul pula problem yang tidak dapat dipisahkan dari masalah pendidikan yaitu pendidikan cenderung menjadi sarana stratifikasi sosial, dan sistem persekolahan hanya mentransfer pengetahuan yang bersifat *text book*.

Kualitas output pendidikan yang berkiblat ke Amerika ini, cenderung mendorong munculnya generasi terdidik yang bersifat materialistik, individualistik dan konsumtif. Selain itu selarna tiga dasawarsa terakhir, dunia pendidikan Indonesia secara kuantitatif

telah berkembang sangat pesat, namun tidak diikuti dengan peningkatan kualitas pendidikan yang sepadan, akibatnya muncul ketimpangan pendidikan di tengah-tengah masyarakat antara lain; ketimpangan output pendidikan dan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan, ketimpangan kualitas pendidikan antar wilayah dan antar penduduk.

Rezim Orde Baru dengan paradigma sentralistik dan otoriter telah melahirkan sistem pendidikan yang tidak mampu melakukan pemberdayaan masyarakat secara efektif, meskipun rezim ini memang telah mampu menunjukkan prestasi yang cukup baik di bidang pendidikan, kemajuan-kemajuan pendidikan secara kuantitatif kita rasakan selama Orde Baru (Suyanto dan Hisyam, 2000). Sejalan dengan itu Zamroni (2000) mengemukakan, tiga permasalahan bidang pendidikan yang sampai saat ini belum teratasi, yaitu: 1) rendahnya mutu sumber daya manusia Indonesia yang dibuktikan dengan data UNP tahun 2000, Human Development Indeks Indonesia menempati urutan ke 109 dari 174 negara, dan tahun 2001 menempati urutan 102 dari 162 negara, 2) hasil pendidikan selama ini belum menunjukkan sikap kedewasaan, tercermin dari sikap atau watak manusia Indonesia yang belum menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kebenaran, dan rasa tanggung jawab, 3) minimnya keterampilan yang dimiliki, kemandirian dalam hal ekonomi, ditandai makin tingginya angka pengangguran. Salah satu tujuan pendidikan adalah kemandirian peserta didik, sehingga mampu survive dalam kehidupan/ akhirnya mempunyai kehormatan diri di tengah-tengah masyarakat.

Guru hendaknya dapat memberikan dorongan dan arahan kepada siswa untuk mencari berbagai sumber yang dapat membantu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang aspek-aspek yang dipelajari. Karena sesuai dengan UUD 1945 pendidikan seharusnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini berarti pendidikan adalah usaha untuk memberdayakan manusia. Manusia yang berdaya adalah manusia yang dapat berpikir kreatif, yang mandiri, dan yang membangun dirinya dan masyarakatnya (Tilaar, 2000:21). Selanjutnya dikemukakan akumulasi permasalahan ini

disebabkan; 1) kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional selama Orde Baru menggunakan pendekatan *educational production function* yang tidak dilaksanakan secara konsekwen. Pendekatan ini melihat lembaga pendidikan sebagai pusat produksi, yang apabila masukan yang diterima diperbaiki akan menghasilkan output yang dikehendaki. Pendekatan ini terlalu memusatkan pada input dan kurang memperhatikan proses. Pada hal proses pendidikan sangat menentukan output pendidikan, 2) penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara sentralistik, sekolah sebagai penyelenggara pendidikan sangat tergantung pada keputusan birokrasi, seringkali kebijakan yang dikeluarkan kontra-produktif dengan kondisi setempat dengan kebutuhan yang diperlukan sekolah tersebut agar sekolah mencermati peran keaktifan siswa yang sangat penting.

Karena setiap siswa yang aktif dan berperan membangun pengetahuan dan pemahamannya sendiri, maka setiap siswa harus mengetahui kekuatan dan kelemahan yang ia miliki. Siswa hendaknya memahami karakteristik belajarnya, motivasi dan inisiatif untuk mengembangkan dan memajukan lembaga, termasuk peningkatan mutu pendidikan sebagai salah satu tujuan pendidikan nasional, 3) peran masyarakat khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan sangat minim. Partisipasi masyarakat lebih bersifat dukungan dana, bukan pada proses pendidikan (pengambilan keputusan, monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas). Sekolah Dalam akuntabilitas, sekolah mempunyai beban tanggung jawab kepada publik, utamanya orang tua siswa, sebagai pihak yang berkepentingan dengan pendidikan.

Kegagalan Orde Baru selain sebagai rezim pemerintahan dan sebagai model berpikir (*state of thinking*) termasuk dalam bidang pendidikan, sehingga perlu disusun paradigma baru dalam usaha membangun masyarakat Indonesia baru. Berbagai upaya pembaharuan pendidikan telah dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi belum menampakkan hasil sebab lebih bersifat tambal sulam (*erratic*).

PEMBAHASAN

Paradigma baru pendidikan membangun masyarakat terdidik, masyarakat yang cerdas, maka mau tidak mau harus merubah paradigma dan sistem pendidikan. Formalitas dan legalitas tetap saja menjadi sesuatu yang penting, akan tetapi perlu diingat bahwa substansi juga bukan sesuatu yang bisa diabaikan hanya untuk mengejar tataran formal saja. Maka yang perlu dilakukan sekarang bukanlah menghapus formalitas yang telah berjalan melainkan menata kembali sistem pendidikan yang ada dsengan paradigam baru yang baik. Dengan paradigma baru, praktik pembelajaran akan digeser menjadi pembelajaran yang lebih bertumpuk pada teori kognitif dan konstruktivistik. Pembelajaran akan berfokus pada pengembangan kemampuan intelektual yang berlangsung secara sosial dan kultural, mendorong siswa membangun pemahaman dan pengetahuan sendiri dalam konteks sosial, dan belajar dimulai dari pengetahuan awal dan prespektif budaya. tugas belajar didesain menantang dan menarik untuk mencapai derajat berpikir tingkat tinggi (Kamdi, 2008).

Dalam salah satu sambutannya, Mendiknas memberikan arah kebijakan mendasar dalam meletakkan kerangka bagi pembangunan pendidikan masa mendatang. Dalam kesempatan tersebut dikemukakan bahwa paradigma pendidikan kita tidak sekedar menempatkan manusia sebagai alat produksi. Manusia harus dipandang sebagai sumber daya yang utuh. Pendidikan tidak boleh terjebak pada teori-teori ekonomi neoklasik, suatu teori yang menempatkan manusia sebagai alat-alat produksi, dimana penguasaan iptek bertujuan menopang kekuasaan dan kepentingan kapitalis.” Saya akan membawa pendidikan sebagai proses pembentukan manusia indonesia seutuhnya” (Kamdi, 2008 :2).

Kelemahan terbesar dari lembaga-lembaga pendidikan dan pembelajaran kita Menurut Purwasamita (2002:132) karena pendidikan tidak memiliki basis pengembangan budaya yang jelas.

Lembaga pendidikan kita hanya dikembangkan berdasarkan model ekonomik

untuk menghasilkan/membudaya manusia pekerja (abdi dalem) yang sudah distel menurut tata nilai ekonomi yang berlatar (kapitalistik,) sehingga tidak mengherankan bila keluaran pendidikan kita menjadi manusia pencari kerja dan tidak berdaya, bukan manusia kreatif pencipta keterkaitan kesejahteraan dalam siklus rangkaian manfaat yang seharusnya menjadi hal yang paling esensial dalam pendidikan dan pembelajaran.

Pemikiran-pemikiran yang positif memberikan arahan bahwa sudah selayaknya jika dunia pendidikan diarahkan pada upaya transformasi Dan pengembangan prinsip-prinsip secara komprehensif dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran. Kepada para peserta didik perlu diberi bekal pengetahuan serta nilai-nilai dasar sebagai suatu pandangan hidup yang sangat berguna untuk mengarungi kehidupan dalam masyarakat pluralis, baik dari aspek etnisitas, kultural, maupun agama. Jika dunia pendidikan berhasil melaksanakan tugas ini, maka pada gilirannya masyarakat kita dimasa depan makin lama akan berkembang menjadi masyarakat yang berkualitas secara intelektual dan moral. Namun sebaliknya jika gagal maka kita tidak bisa berharap generasi dimasa depan akan mampu menampilkan sosok bangsa yang cerdas serta mampu menjunjung nilai-nilai luhur budaya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemimpin yang mampu menumbuhkan suasana dialogis, kesetaraan dan tidak arogan atau non defensif serta selalu berupaya mendorong sikap positif, akan dapat mendorong terjadinya keefektifan Proses pembelajaran Goldsmith, 1996: 236). Para pendidik maupun peserta didik, sesuai dengan kapasitasnya, harus berusaha untuk mampu saling menghargai dan menghormati pendapat atau pandangan orang lain. Karena itu suasana pendidikan harus diciptakan dalam rangka mengembangkan dialog-dialog kreatif dimana setiap peserta didik diberi kesempatan yang sama untuk diskusi, berdebat, mengajukan dan merespon berbagai persoalan yang muncul dalam setiap kegiatan pembelajaran. Yang penting adalah bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menjadi sebijaksana mungkin menurut kemampuannya

masing-masing. Suasana kesetaraan perlu dikembangkan dengan berorientasi pada upaya mendorong peserta didik agar mampu menyelesaikan berbagai perbedaan yang ada di antara sesama secara harmonis dan rasional

Dalam proses pembelajaran, pengembangan potensi-potensi siswa seharusnya dilakukan secara menyeluruh dan terpadu. Pengembangan potensi siswa secara tidak seimbang pada gilirannya menjadikan pendidikan cenderung lebih peduli pada pengembangan satu aspek kepribadian tertentu saja, bersifat partikular dan parsial. Pada hal sesungguhnya pertumbuhan dan perkembangan siswa merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh semua sekolah dan guru. Dan itu berarti sangat keliru jika guru hanya bertanggung jawab menyampaikan materi pelajaran pada bidang studinya saja (Gordon, 1997:8) Guru memegang peranan strategis dalam upaya membentuk watak bangsa melalui pengembangan kepribadian dan nilai-nilai yang diinginkan. Dari dimensi tersebut, peranan guru sulit digantikan oleh yang lain (Supriadi: 1998) karena proses pembelajaran di kelas, guru tidak cukup hanya berbekal pengetahuan berkenaan dengan bidang studi yang diajarkan, akan tetapi perlu memperhatikan aspek-aspek pembelajaran secara holistik yang mendukung terwujudnya pengembangan potensi-potensi peserta didik.

Selanjutnya Menteri Pendidikan nasional, dalam sambutannya pada seminar lokakarya nasional FORMOPPI-Balitbang Dikans 19 April 2005, mengemukakan bahwa secara filosofis pendidikan ditantang untuk melakukan redefinisi, tantang tujuan, fungsi, dan hakekat pendidikan yang berperan sebagai “human education for all human being” pendidikan harus keseimbangan dalam peranannya membangun peserta didik sebagai warga dunia, warga bangsa dan warga masyarakat. Dengan demikian, secara filosofis arah pendidikan harus menyeimbangkan antara perkembangan global di suatu sisi dan akar budaya dalam konteks lokal di sisi yang lain.

Demikian pula arah pendidikan harus menyeimbangkan antara hal-hal yang akan berdimensi masa depan dengan hal-hal yang berdimensi masa kini. Menurutnya secara substansi, arah pendidikan harus membekali

peserta didik dengan kompetensi yang bersifat *subject matter* dan kompetensi lintas kurikulum (*cross curricular competencial*) yang diperlukan. Kompetensi *subject matter* berkaitan dengan mata pelajaran yang harus benar-benar dipilih oleh satuan pendidikan sebagai dasar peserta didik untuk memahami dan mengembangkan kompetensi dirinya. Kompetensi lintas kurikulum adalah kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan peserta didik sebagai individu, yang baik secara implisit maupun eksplisit terkait dengan berbagai mata pelajaran.

Paradigma baru pendidikan Indonesia akan lebih baik tergantung pada bagaimana konsep manusia lengkap dengan tujuan hidup dan analisis mengenai tantangan zamannya. Dalam kiatan itu Mastuhu (dalam Rahardjo, 1997) menjelaskan salah satu dimensi manusia adalah melampaui makhluk-makhluk lain sesama ciptaan Tuhan, karena manusia memiliki tiga sifat utama yang tidak dimiliki oleh makhluk lain (a) sadar diri, (b) kehendak bebas, dan (c) berpikir atau kreativitas. Di era globalisasi Indonesia melakukan reformasi dalam proses pendidikan, dengan tekanan menciptakan sistem pendidikan yang lebih komprehensif dan fleksibel, sehingga para lulusan lembaga pendidikan dapat berfungsi secara efektif dalam kehidupan masyarakat global yang demokratis.

Pembelajaran sebagai pilar Utama pendidikan komisi pendidikan untuk abad XXI (Unesco, 1996:85) melihat bahwa hakekat pendidikan sesungguhnya adalah belajar (*Learning*) selanjutnya dikemukakan bahwa pendidikan bertumpuk pada 4 pilar yaitu (1) *learning to know* (2) *learning to do* (3) *learning to live together*, *learning to live with others*, dan (4) *learning to be*.

Learning to know adalah upaya memahami instrumen-instrumen pengetahuan baik sebagai alat maupun sebagai tujuan. Sebagai alat, pengetahuan tersebut diharapkan akan memberikan kemampuan sikap orang untuk memahami berbagai aspek lingkungan agar mereka dapat hidup dengan harkat dan martabatnya dalam rangka mengembangkan keterampilan kerja dan berkomunikasi dengan berbagai pihak yang diperlukan. Sebagai

pengetahuan, maka pengetahuan tersebut akan bermanfaat dalam rangka meningkatkan pemahaman, pengetahuan, serta penemuan di dalam kehidupannya.

Learning to do lebih ditekankan pada bagaimana mengajarkan anak-anak untuk mempraktekkan segala sesuatu yang telah dipelajarinya dan dapat mengadaptasikan pengetahuan-pengetahuan yang telah diperoleh tersebut dengan pekerjaan pekerjaan dimasa depan. Memperhatikan secara cermat kemajuan-kemajuan serta perubahan-perubahan yang terjadi, maka pendidikan tidak cukup hanya dipandang sebagai transmisi atau melaksanakan tugas-tugas rutin, akan tetapi harus mengarah kepada pemberian kemampuan untuk berbuat menjangkau kebutuhan kebutuhan dinamis masa mendatang, karena lapangan kerja dimasa mendatang akan sangat tergantung pada kemampuan untuk mengubah kemajuan dalam pengetahuan yang melahirkan usaha atau pekerjaan-pekerjaan baru.

Learning to live together, learning, learning to live with others, pada dasarnya adalah mengajarkan, melatih dan membimbing peserta didik agar mereka dapat menciptakan hubungan melalui komunikasi yang baik, menjauhi prasangka-prasangka buruk terhadap orang lain serta menjauhi dan menghindari terjadinya perselisihan dan konflik.

Learning to be, sebagaimana diungkapkan secara tegas oleh komisi pendidikan, bahwa prinsip fundamental pendidikan hendaklah mampu memberikan kontribusi untuk perkembangan seutuhnya setiap orang, jiwa dan raga, intelegensi, kepekaan, rasa etika, tanggung jawab pribadi dan nilai-nilai spiritual.

Keempat pilar pendidikan sebagaimana dipaparkan di atas, sekaligus misi dan tanggung jawab yang harus diemban oleh pendidikan. Melalui kegiatan belajar mengetahui, belajar berbuat, belajar hidup bersama dan belajar menjadi seseorang atau belajar menjadi diri sendiri yang didasari keinginan secara sungguh-sungguh maka akan semakin luas wawasan seseorang tentang pengetahuan, tentang nilai-nilai positif tentang orang lain serta berbagai dinamika perubahan yang terjadi. Kesemuanya

ini diharapkan menjadi modal fundamental bagi seseorang untuk mampu mengarahkan dirinya dalam berperilaku positif berpijak pada nilai-nilai yang dia yakini kebenarannya, dan pada gilirannya akan semakin terbuka pikiran untuk melihat fakta-fakta yang benar dan yang salah, sesuatu tindakan yang sesungguhnya merugikan ataupun membawa kemajuan bagi diri orang lain.

Kemampuan-kemampuan tersebut juga akan membekali individu untuk mampu melihat secara nyata betapa konflik dan pertikaian-pertikaian telah memberikan banyak kerugian didalam tatanan kehidupan masyarakat dan bangsa, dan merugikan diri serta lingkungannya. Pada sisi lain seseorang juga akan mampu melihat bagaimana suasana yang harmoni dapat memberikan kenyamanan dan ketentraman dalam hidup, sehingga memberikan banyak kesempatan bagi suatu masyarakat dan bangsa mencapai kemajuan-kemajuan yang lebih berarti bagi semua orang.

Pendidikan berwawasan global (Zamroni, 2000) dapat dikaji berdasarkan dua perspektif, yaitu kurikuler dan perspektif reformasi. Dari perspektif kurikuler pendidikan berwawasan global menyajikan kurikulum yang bersifat interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner. Zamroni (2000) menjelaskan bahwa pandangan ini menimbulkan dua macam pembaharuan di dunia pendidikan; (1) pendidikan menekankan pada anak didik "berpikir global dan bertindak bersifat lokal", dan (2) pembaharuan makna efisiensi, tidak semata-mata bermakna ekonomis, tetapi meliputi pula keharmonisan dengan lingkungan, solidaritas, dan kebaikan untuk semuanya.

Menurut Tilaar (2000) mengacu pada empat indikator perkembangan sistem pendidikan nasional yaitu; (1) popularisasi pendidikan, (2) sistematisasi pendidikan, (3) proliferasi pendidikan, dan (4) politisasi pendidikan.

1. Popularisasi Pendidikan, paradigmanya:
 - a. Peningkatan pendidikan merupakan pemutusan mata rantai kemiskinan (teori lingkaran setan penanggulangan kemiskinan)
 - b. Mempercepat terpenuhinya wajib belajar pendidikan sekolah dasar untuk semua

- anak usia sekolah dasar (*Education for all*), dan
- c. merintis pelaksanaan wajib belajar 9 tahun untuk meningkatkan kecerdasan rakyat.
2. Sistematisasi pendidikan, paradigmanya:
 - a. dengan adanya sistem yang baku dapat dihasilkan (1) perencanaan dan manajemen yang efisien, (2) memudahkan supervisi, dan, (3) peningkatan mutu pendidikan, (2)
 - b. penyeragaman pendidikan akan menghasilkan terwujudnya kesatuan bangsa,
 - c. etatisme dalam pendidikan akan menjaga mutu pendidikan nasional.
 3. Proliferasi pendidikan, paradigmanya:
 - a. praktis pendidikan terjadi di sekolah maupun di luar sekolah,
 - b. pendidikan merupakan tanggung jawab bersama orang tua, masyarakat, dan negara
 - c. pertumbuhan ekonomi harus diikuti dengan penyediaan tenaga-tenaga terampil oleh sistem pendidikan nasional.
 4. Politisasi pendidikan, paradigmanya:
 - a. pendidikan adalah alat mempertahankan ideology negara atau lebih sempit lagi untuk mempertahankan kepentingan pemerintah yang berkuasa,
 - b. pendidikan nasional yang baik dengan sendirinya dapat memecahkan masalah-masalah sosial budaya,
 - c. manajemen pendidikan ditangani oleh birokrasi agar tercipta kesatuan persepsi dalam menjalankan tugas pendidikan.
- Untuk mengkaji lebih jauh problematika seputar pendidikan di tanah air, diuraikan sebagai berikut:
1. Popularisasi Pendidikan; Paradigmanya peningkatan pendidikan merupakan pemutusan mata rantai kemiskinan (teori lingkaran setan penanggulangan kemiskinan meliputi; 1) pendidikan dan pelatihan yang bermutu adalah pendidikan yang dibutuhkan oleh rakyat banyak, 2) pendidikan yang bermutu telah merupakan kebutuhan rakyat banyak oleh sebab itu partisipasi keluarga dan masyarakat dalam penyelenggaraan, investasi, evaluasi pendidikan semakin ditingkatkan, dan 3) investasi pendidikan melalui sektor pemerintahan lebih ditingkatkan dan dijadikan komitmen politik.
 2. Sistematisasi Pendidikan; Paradigma barunya mencakup: a) pengembangan dan pemantapan sistem pendidikan nasional dititik-beratkan kepada pemberdayaan lembaga dengan memberi otonomi yang luas, b) pengembangan sistem pendidikan nasional yang terbuka bagi keragaman dalam pelaksanaannya, dan c) program-program nasional dibatasi hanya pada upaya pengembangan kesatuan bangsa.
 3. Proliferasi Pendidikan; Paradigma barunya: a) proliferasi "delivery system" pendidikan semakin kompleks dalam dunia yang terbuka memerlukan kebijakan yang terintegrasi dalam berbagai program, termasuk program pelatihan, media massa, dan media elektronika, dan b) pendidikan dan pelatihan tenaga-tenaga profesional dalam berbagai tingkat diorientasikan terutama pada kebutuhan daerah dan kebutuhan pasar kerja di daerah, dan
 4. Politisasi Pendidikan; Paradigma barunya mencakup; a) pendidikan nasional ikut serta dalam mendidik manusia Indonesia sebagai insan politik yang demokratis yaitu yang sadar akan hak-hak serta kewajibannya sebagai warga negara yang bertanggung jawab, dan b) masyarakat, termasuk keluarga, bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan.
- Selanjutnya dijelaskan Tilaar (2000) bahwa melalui paradigma baru pendidikan dituntut untuk menekankan pengembangan kemampuan tertentu pada diri anak didik, antara lain: (1) kemampuan untuk mendekati permasalahan secara global dengan pendekatan multidisipliner, (2) kemampuan untuk menyeleksi arus informasi yang sedemikian deras, untuk kemudian dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari, (3) kemampuan untuk menghubungkan peristiwa satu dengan yang lain secara kreatif, (4) meningkatkan kemandirian anak karena tingkat otonomi kehidupan pribadi dan keluarga semakin tinggi, (5) menekankan

pengajaran lebih pada *learning how to learn*, dari pada *learning something*.

Sehubungan dengan itu maka lembaga pendidikan harus bergeser untuk mengembangkan kultur pembelajaran yang holistik termasuk mengembangkan visi pendidikan yang jelas, konsisten, disertai dengan kepemimpinan yang dapat memberikan arah, memajukan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran, mengembangkan masyarakat pembelajaran, mendorong munculnya iklim belajar dimanapun juga, dan secara sadar mengembangkan proses sosialisasi profesional baik di kalangan guru ataupun siswa.

Untuk itu dalam reformasi dua hal yang perlu dilakukan, yaitu: (a) mengidentifikasi atas berbagai problem yang menghambat terlaksananya pendidikan, dan (b) merumuskan reformasi yang bersifat strategik dan praktis sehingga dapat diimplementasikan di lapangan.

Bertolak dari hal tersebut, Dryden dan Jeannette (1999) mengemukakan bahwa tampaknya setiap visi pendidikan yang terarah harus meliputi faktor-faktor: (a) pembelajaran berkelanjutan sepanjang hayat menjadi faktor kunci dalam kehidupan seseorang, (b) dalam konteks tersebut setiap orang harus didorong untuk merencanakan kurikulum kehidupannya sendiri, (c) meskipun tidak ada cara mengajar dan belajar yang baku, ada banyak teknik yang memungkinkan seseorang belajar dengan cepat, lebih baik, dan lebih cerdas. Dan suatu pencarian dengan pikiran terbuka terhadap gagasan-gagasan baru adalah kunci menuju dunia masa depan dan juga kunci menuju sekolah masa depan, (d) setiap negara menjalin hubungan yang sinergis dengan sekolah, sistem administrasi, dan program pelatihan guru.

Sehingga dengan demikian maka, reformasi pendidikan yang diperlukan yaitu yang bersifat menyeluruh dan mendasar, menyangkut dimensi, cultural, fokusional politik-kebijakan, teknis-operasional, dan dimensi kontekstual. Selain itu reformasi pendidikan juga harus menghindari upaya pencapaian hasil jangka pendek atau semu dengan paradigma pencapaian hasil jangka panjang.

Menurut Dryden dan Jeannette (1999) bahwa maka ada 12 langkah utama mengubah

sistem pendidikan (menuju sistem sekolah masa depan), yaitu: (1) Sekolah menjadi pusat sumber daya masyarakat sepanjang hayat; (2) Tanya dulu pelanggan anda; (3) Jaminan kepuasan pelanggan; (4) Layani semua ragam kecerdasan dan gaya belajar; (5) Gunakan teknik pengajaran terbaik di dunia; (6) Lihatlah sumber daya utama: Guru; (7) Jadikan setiap orang guru dan sekaligus murid; (8) Rencanakan kurikulum empat-bagian; (9) Ubahlah sistem penilaian; (10) Gunakan teknologi masa depan; (11) Gunakan seluruh masyarakat sebagai sumber daya; (12) Bagi semua orang: hak memilih.

Perubahan tersebut merupakan kesadaran akan anomali untuk melahirkan kebutuhan paradigma baru yaitu rekonstruksi terhadap asas-asas yang mendasar di dalam usaha meletakkan dasar-dasar yang paling rasional untuk mengubah praksis pendidikan di dalam rangka membangun masyarakat Indonesia baru.

PENUTUP

Kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional selama Orde Baru menggunakan pendekatan *educational production function* yang tidak dilaksanakan secara konsekwen dengan sistem manajemen penyelenggaraan pendidikan dilakukan yang sentralistik,

Ternyata tidak membawa kemajuan yang berarti bagi peningkatan kualitas pendidikan pada umumnya. Dengan demikian dalam kasus-kasus tertentu, manajemen yang sentralistik telah menyebabkan terjadinya pemandulan kreativitas pada satuan pendidikan pada berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Untuk mengatasi terjadinya stagnasi di bidang pengajaran yang berlangsung maka diperlukan adanya paradigma baru di bidang pendidikan. Dalam mengembangkan pendidikan sebagai proses pemberdayaan anak didik, secara filsafati, harus berpijak pada fakta dan realita. Proses pendidikan melalui pelaksanaan kegiatan pembelajaran harus memberikan kesempatan yang seharusnya bagi peserta didik untuk mengembangkan pengetahuannya.

Pendekatan manajemen berbasis sekolah ditujukan bukan sekedar mengubah pendekatan

pengelolaan sekolah yang sentralistik ke desentralistik, tetapi lebih dari itu melalui pendekatan ini diyakini akan muncul kemandirian sekolah. Selain itu melalui pendekatan ini kepedulian masyarakat untuk ikut serta mengontrol dan menjaga kualitas layanan pendidikan akan lebih terbuka untuk dibangkitkan. Dengan demikian kemandirian sekolah akan diikuti oleh daya kompetisi yang tinggi akan akuntabilitas publik yang memadai

DAFTAR BACAAN

- Kamdi, Waras. 2008. Paradigma Baru Pendidikan. <http://www.unisosdem.org>. diakses tanggal 13-04-2010
- Mudyahrdjo,R. 2001. Pengantar Pendidikan Sebuah Sebuah Studi Awal Tentang Dasar-Dasar Pendidikan Pada Pendidikan Pada Umumnya Dan Pendidikan di Indonesia. Jakarta: Rajagrafindo. Persada
- Muhibinsyah. 2003. Psikologi Pendidikan Sebuah Dengan pendekatan Baru. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Poerbakawatja dan Harahap. 1982. Ensiklopedi Pendidikan. Jakarta: Gunung Agung
- Purwasasmita, M. 2000. Kajian Fenomenologi Nilai. Bandung.
- Rahardjo, M Dawam. 1997. Keluar dari Kemelut Pendidikan Nasional. Jakarta: Intemasa.
- Supriadi, D. 1997. Isu dan Agenda Pendidikan Tinggi di Indonesia. Jakarta: PT. Rosda Jayaputra.
- Suyanto dan Djihad Hisyam. 2000. Pendidikan di Indonesia Memasuki Milenium III. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Tilaar, H.A.R.2000. Paradima Baru Pendidikan Nasional. Jakarta: Rineka Cipta.
- Zamroni. 2000. Paradigma Pendidikan Masa Depan. Yogyakarta: Biograf Publishing